

## Mengkaji Ulang Pemerintahan Desa di Indonesia: Peta Intelektual dan Dinamika Riset Bibliometrik (2000-2025)

Ahmad Rizali Pawane<sup>1\*</sup>, Syamsul Bahri Abd. Rasyid<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Department of Government Studies, Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena, Papua's Highlands

<sup>2</sup> Department of Government Studies, Universitas Pattimura, Maluku

**Abstract.** This study examines the status of Indonesian village administration research from 2000 to 2025. This research employs a qualitative approach, examining secondary literature through a bibliometric lens. The present study used the Scopus search engine to identify relevant research on Indonesian villages. VOSviewer and NVivo version 12 plus were utilized as software for the mapping and analysis of data. The study's findings indicate that most research publications were made in 2023, with the most contributions originating from Indonesia. The International Journal of Innovation, Creativity and Change is the most prominent publication in this field. Haryanto has been the most prolific contributor to this publication. Furthermore, subjects on communication, community participation, indigenous populations, local wisdom, and politics will represent significant research opportunities for scholars interested in Indonesian village administration. In the context of scientific publications on Indonesian village administration, community (in addition to the village and local governments) emerged as the most prevalent topic from 2000 to 2025, as evidenced by the analysis of publications indexed in the Scopus database. Conceptually, the identified publication trends indicate a shift in the focus of studies from a normative-institutional approach to a more complex and multidimensional approach, which combines political, social, economic, and cultural aspects in understanding the dynamics of democracy at the local level.

**Keywords:** Village Government; Bibliometrics; Scopus; NVivo 12 plus; VOSviewer

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian tentang pemerintahan desa di Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan 2025. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif-studi pustaka dengan spesifikasi analisis bibliometrik. Penelitian ini menggunakan mesin pencari Scopus untuk mengidentifikasi penelitian terkait pemerintahan desa di Indonesia serta VOSviewer dan NVivo versi 12 plus sebagai software untuk memetakan dan menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi penelitian dilakukan paling banyak di tahun 2023, dengan Indonesia sebagai negara yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap publikasi penelitian. Sementara International Journal of Innovation Creativity and Change merupakan sumber publikasi tertinggi. Haryanto merupakan penulis yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap publikasi ini. Lebih lanjut, topik tentang communication, community participation, indigenous people, local wisdom, hingga political will adalah topik-topik yang memiliki peluang besar untuk penelitian lebih lanjut, berkaitan dengan tema pemerintahan desa di Indonesia. Sementara itu, community (selain desa dan pemerintahan) menjadi topik yang paling sering disinggung dalam publikasi penelitian ilmiah bertema pemerintahan desa di Indonesia pada rentang waktu 2000-2025 yang terindeks Scopus. Secara konseptual, tren publikasi yang teridentifikasi menunjukkan pergeseran fokus kajian dari pendekatan normatif-institusional menuju pendekatan yang lebih kompleks dan multidimensional, yang memadukan aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya dalam memahami dinamika demokrasi di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** Pemerintahan Desa; Bibliometrik; Scopus; NVivo 12 plus; VOSviewer

Received: 31/07/2025

Revised: 29/12/2025

Accepted: 30/12/2025

### Korespondensi:

Department of Government Studies, Universitas Amal Ilmiah  
(UNA'IM) Yapis Wamena, Papua's Highlands  
Jln. Hom-Hom Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, 99511  
Email: ahmad.rizali1608@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan level pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, namun memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, dan demokrasi lokal. Secara normatif, pengaturan mengenai pemerintahan desa telah berlangsung sejak masa awal kemerdekaan melalui UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, dan UU Nomor 19 Tahun 1965, kemudian mengalami penyeragaman melalui UU Nomor 5 Tahun 1979, hingga memperoleh penguatan signifikan melalui berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Kridasakti et al., 2022). Undang-undang terakhir ini menandai perubahan besar dalam tata kelola desa, terutama melalui penguatan kewenangan desa, peningkatan alokasi dana desa, serta penegasan peran kelembagaan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Rauf & Maulidiah, 2015: 121).

Perubahan regulatif tersebut mendorong meningkatnya perhatian akademik terhadap isu pemerintahan desa, khususnya setelah tahun 2014. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kajian tentang desa berkembang pesat dan mencakup beragam tema, seperti tata kelola desa, relasi desa–negara, dana desa, korupsi desa, hingga konsep smart village (Antlöv et al., 2016; Mahsun et al., 2025). Kendati demikian, perkembangan literatur tersebut cenderung tersebar dan terfragmentasi pada isu-isu tertentu, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai arah, pola, dan struktur perkembangan penelitian tentang pemerintahan desa di Indonesia.

Beberapa studi terdahulu telah memanfaatkan pendekatan bibliometrik untuk memetakan kajian desa dan wilayah pedesaan. Penelitian Rahoveanu et al. (2022) mengidentifikasi peningkatan signifikan penelitian smart village secara global dan keterlibatan lintas disiplin ilmu. Studi Putri et al. (2023) menunjukkan keterkaitan erat antara isu ekonomi, politik, dan korupsi desa serta pergeseran fokus penelitian dari Afrika ke Asia. Sementara itu, penelitian Muhtar et al., (2023) menekankan peran inovasi, pengetahuan, dan manajemen dalam pengembangan smart village di Indonesia. Meskipun demikian, studi-studi tersebut masih berfokus pada konsep desa atau wilayah pedesaan secara umum, belum secara spesifik menempatkan

pemerintahan desa di Indonesia sebagai unit analisis utama dalam pemetaan publikasi ilmiah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan teoretis dan empiris dalam literatur. Secara teoretis, belum tersedia pemetaan yang secara sistematis menggambarkan struktur intelektual kajian pemerintahan desa di Indonesia, termasuk bagaimana konsep-konsep tata kelola, demokrasi lokal, dan pembangunan desa saling terhubung dalam literatur ilmiah. Secara empiris, meskipun Indonesia merupakan negara dengan jumlah desa terbesar dan dinamika kebijakan desa yang sangat signifikan pasca UU Desa 2014, belum terdapat studi bibliometrik yang secara khusus dan longitudinal memetakan tren publikasi ilmiah mengenai pemerintahan desa di Indonesia dalam jangka waktu panjang. Akibatnya, arah perkembangan penelitian, tema dominan, serta pola kolaborasi ilmiah dalam kajian pemerintahan desa masih belum menggambarkan secara komprehensif.

Berangkat dari gap tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tren publikasi ilmiah mengenai pemerintahan desa di Indonesia selama periode 2000–2025 melalui pendekatan bibliometrik. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pertumbuhan publikasi, jaringan kolaborasi penulis dan afiliasi, distribusi wilayah penelitian, serta struktur kata kunci dan tema dominan beserta korelasi antar topik. Secara konseptual, studi ini berpijak pada kerangka teoretis tata kelola (governance) dan demokrasi lokal, yang memandang pemerintahan desa sebagai arena interaksi antara institusi, aktor, dan kebijakan dalam konteks desentralisasi. Data penelitian bersumber dari database Scopus dengan kriteria artikel jurnal berbahasa Inggris pada bidang ilmu sosial (Social Sciences), yang dianalisis menggunakan VOSviewer dan NVivo 12 Plus.

Secara bertahap, data dokumen publikasi yang diambil dari database Scopus, sebelumnya dibuatkan *search syntax* terlebih dahulu sebagai fokus analisis di dalam penelitian. Adapun *search syntax* yang dimunculkan oleh database Scopus, yakni: (TITLE-ABS-KEY ("village government"\*) AND TITLE-ABS-KEY ("indonesia")) AND PUBYEAR > 1999 AND PUBYEAR < 2026 AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, "SOCI")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar")) AND (LIMIT-TO (SRCTYPE, "j")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "English")).



**Gambar 1.** Pencarian pada database Scopus, 23 Juli 2025

Sumber: Diolah penulis (2025)

Kontribusi utama artikel ini terhadap literatur adalah penyediaan pemetaan bibliometrik komprehensif mengenai kajian pemerintahan desa di Indonesia yang hingga kini belum tersedia. Artikel ini tidak hanya menyajikan gambaran kuantitatif pertumbuhan publikasi, tetapi juga mengungkap struktur intelektual, pola kolaborasi ilmiah, serta evolusi tema penelitian yang berkembang dalam kajian pemerintahan desa di Indonesia. Penelitian diharapkan dapat memperkaya diskursus teoretis tentang tata kelola dan demokrasi lokal, sekaligus menjadi rujukan empiris bagi penelitian lanjutan dan perumusan kebijakan pemerintahan desa di Indonesia.

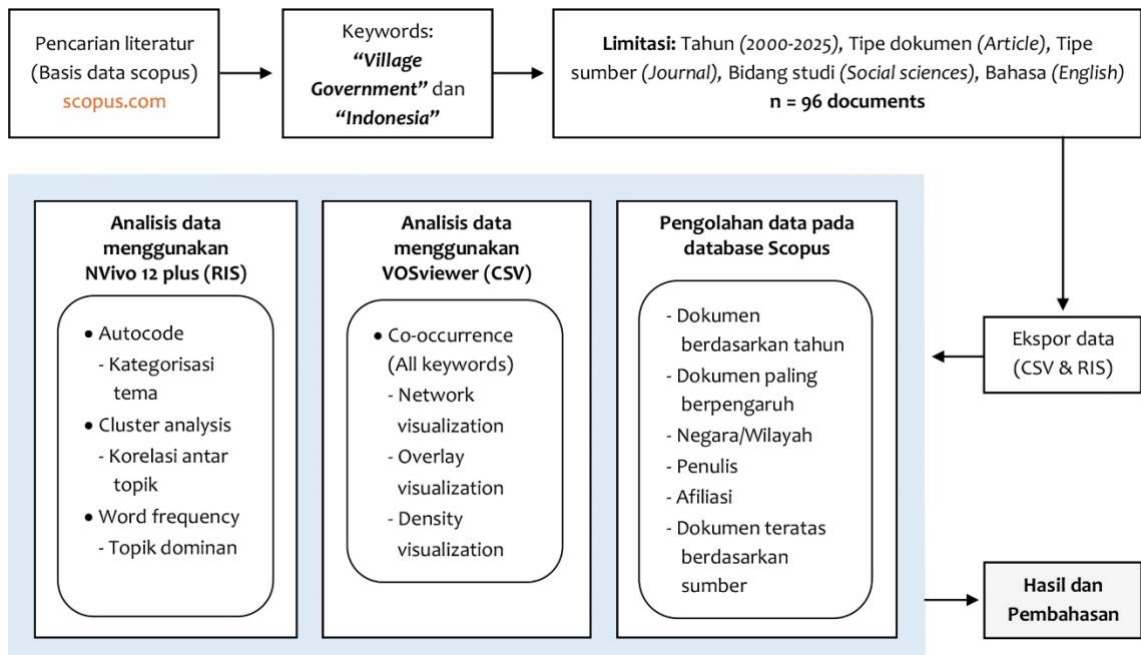
## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan spesifikasi analisis bibliometrik. Secara epistemologis, analisis bibliometrik dipilih karena memungkinkan peneliti memahami perkembangan pengetahuan ilmiah sebagai suatu konstruksi sosial yang terstruktur dalam jaringan publikasi, sitasi, dan tema-tema riset. Dalam konteks penelitian pemerintahan desa di Indonesia, bibliometrik berfungsi untuk memetakan pola produksi pengetahuan, kecenderungan topik, serta relasi antaraktor akademik secara sistematis dan berbasis data, bukan sekadar interpretasi subjektif peneliti. Pendekatan ini relevan ketika tujuan penelitian tidak hanya menjawab apa yang diteliti, tetapi juga bagaimana dan

ke arah mana diskursus ilmiah berkembang (González-Torres et al., 2020; van Eck & Waltman, 2017).

Analisis bibliometrik juga dipilih karena memiliki karakter sistematis, transparan, dan replikatif, sehingga mampu menjamin kualitas informasi dan keluaran penelitian (Churiyaha et al., 2022; Fahimnia et al., 2015; Keathley-Herring et al., 2016; Tang et al., 2018). Berbeda dengan tinjauan literatur tradisional yang cenderung bersifat naratif dan sangat bergantung pada subjektivitas peneliti, bibliometrik menempatkan data publikasi sebagai dasar utama analisis, sehingga lebih sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berorientasi pada pemetaan tren, struktur pengetahuan, dan hubungan tematik dalam literatur ilmiah. Meski demikian, penelitian ini tidak menafikan nilai pendekatan kualitatif interpretatif, melainkan memposisikan bibliometrik sebagai sarana untuk memperoleh gambaran makro yang dapat melengkapi tinjauan kritis tradisional (van Eck & Waltman, 2017).

Sumber data penelitian diperoleh dari database Scopus yang dikelola oleh Elsevier, yang dipilih karena reputasinya sebagai salah satu basis data bibliografi paling komprehensif dan bereputasi internasional (Niñerola et al., 2019). Penelusuran dilakukan pada 1 Agustus 2025 terhadap publikasi ilmiah yang berkaitan dengan tema pemerintahan desa di Indonesia, dengan rentang waktu 2000–2025. Dari proses penelusuran tersebut diperoleh sebanyak 96 dokumen ilmiah yang kemudian dijadikan korpus data penelitian. Pemilihan Scopus secara epistemologis mencerminkan upaya peneliti untuk menangkap arus utama dalam literatur global, sekaligus memastikan standar kualitas publikasi yang dianalisis. Penelitian ini, juga menggunakan alat analisis berupa software VOSviewer dan NVivo 12 plus, untuk memvisualisasikan jaringan data (peta bibliometrik) serta relasi antar topik studi yang berkaitan dengan tema penelitian (Liao et al., 2018; Sulistyaningsih et al., 2021).



Gambar 2. Tahapan penelitian

Sumber: Diolah penulis (2025)

Gambar 2 menunjukkan tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menjelajahi database Scopus pada 1 Agustus 2025 untuk mendapatkan publikasi dokumen terkait pemerintahan desa di Indonesia. Arsip bibliografi memiliki catatan sebanyak 96 dokumen, dengan rentang waktu 2000-2025.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama. Tahap pertama adalah eksplorasi dan analisis awal metadata dalam database Scopus untuk mengidentifikasi karakteristik umum publikasi, seperti tren tahunan, penulis dan afiliasi dominan, sumber publikasi, negara asal, tingkat sitasi, serta indikator kualitas jurnal (Hallinger & Suriyankietkaew, 2018; Herrera-Franco et al., 2020). Tahap ini berfungsi sebagai fondasi untuk memahami lanskap umum penelitian serta posisi kajian pemerintahan desa Indonesia dalam diskursus akademik yang lebih luas.

Tahap kedua menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memvisualisasikan dan mengevaluasi jaringan bibliometrik. Secara konseptual, visualisasi ini memungkinkan peneliti melihat struktur pengetahuan sebagai jaringan relasional yang terdiri atas keterkaitan sitasi, kolaborasi penulis, serta kemunculan bersama kata kunci (Montalván-Burbano et al., 2020; Hockerts et al., 2018). Analisis yang dilakukan meliputi *citation analysis*, *co-authorship*, dan *co-occurrence* kata kunci

guna mengidentifikasi klaster tema dan arah perkembangan penelitian (Nobanee et al., 2021; van Eck & Waltman, 2017). Melalui pendekatan ini, tema-tema penelitian tidak dipahami secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari struktur diskursif yang saling terhubung.

Tahap ketiga menggunakan NVivo 12 Plus untuk memperdalam analisis tematik dan hubungan antar topik. Berbeda dengan VOSviewer yang menekankan visualisasi jaringan, NVivo digunakan untuk mengklasifikasikan tema, mengukur keterkaitan antar topik menggunakan koefisien Jaccard, serta mengidentifikasi intensitas kemunculan kata melalui analisis word frequency (Sulistyaningsih et al., 2021; Gómez-Corona et al., 2017; Jhamb et al., 2021). Fitur autocode dimanfaatkan untuk meminimalkan subjektivitas peneliti dalam proses pengodean dan memungkinkan pemrosesan data dalam volume besar secara konsisten (Rojas-Figueroa et al., 2019; Amrutha & Geetha, 2020; Machmud et al., 2021). Kata-kata yang tidak relevan secara substantif kemudian dieliminasi untuk meningkatkan ketepatan temuan (Wayan et al., 2021).

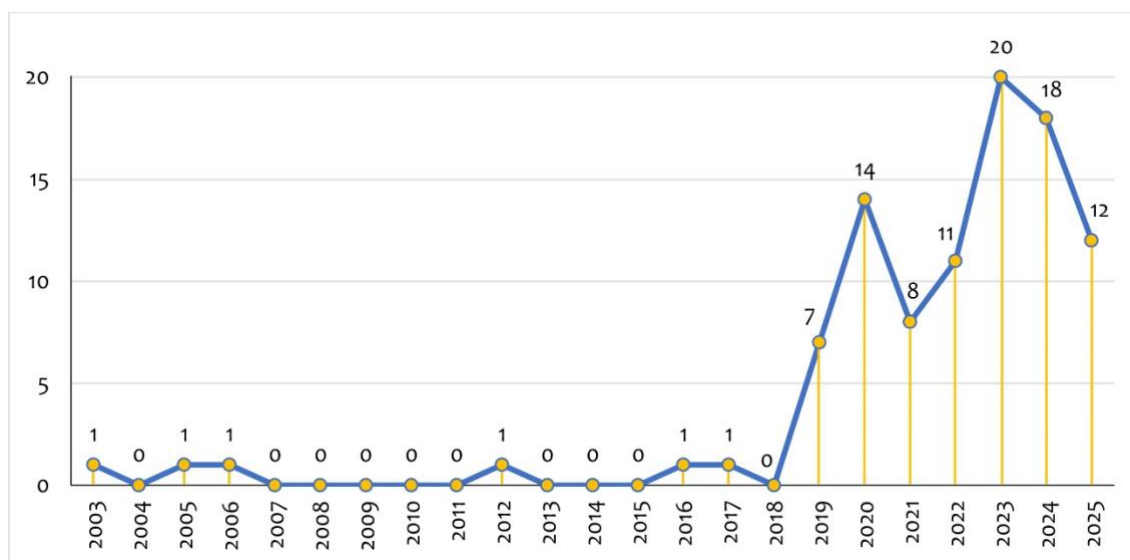
Meskipun menawarkan keunggulan dalam pemetaan struktur pengetahuan, penelitian ini menyadari sejumlah keterbatasan metodologis. Pertama, analisis bibliometrik sangat bergantung pada kualitas dan cakupan database yang digunakan, sehingga publikasi di luar Scopus (misalnya Web of Science dan SINTA) berpotensi tidak terakomodasi. Kedua, bibliometrik lebih menekankan pola kuantitatif relasi publikasi dibandingkan kedalaman substansi argumen dalam setiap karya, sehingga tidak sepenuhnya menggantikan analisis kualitatif mendalam terhadap isi teks. Ketiga, penggunaan perangkat lunak seperti VOSviewer dan NVivo tetap memerlukan keputusan analitis peneliti dalam menentukan parameter dan interpretasi hasil, yang dapat memengaruhi keluaran penelitian (Knapczyk et al., 2018; Rojas-Figueroa et al., 2019).

Dengan mempertimbangkan kekuatan dan keterbatasannya, analisis bibliometrik dalam penelitian ini diposisikan sebagai pendekatan eksploratif dan pemetaan awal yang menyediakan fondasi empiris bagi pengembangan kajian substantif lanjutan mengenai pemerintahan desa dan demokrasi lokal di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Bibliometrik Publikasi Penelitian Pemerintahan Desa

Secara keseluruhan, dari hasil penelusuran dalam database Scopus dengan kata kunci pencarian "village government" dan "indonesia," dan setelah dilimitasi, didapatkan sebanyak 96 artikel jurnal pada rentang waktu 2000 hingga 2025, dimana dokumen pada tahun 2003, adalah dokumen pertama yang membicarakan tentang pemerintahan desa di Indonesia. Itu artinya, pada rentang tahun 2000 hingga 2002, tidak ada publikasi artikel jurnal dalam database scopus yang membicarakan tentang pemerintahan desa di Indonesia. Adapun analisis bibliometrik yang ditampilkan berupa jumlah publikasi berdasarkan tahun sumber publikasi, penulis, negara, dan afiliasi yang berkontribusi dalam penerbitan penelitian tentang topik pemerintahan desa di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana tema-tema dan teori-teori tentang topik pemerintahan desa di Indonesia berkembang dalam publikasi penelitian global di database scopus. Lebih lanjut, analisis bibliometrik ini juga penting untuk memetakan publikasi penelitian tentang topik pemerintahan desa di Indonesia yang memiliki dampak signifikan di dunia akademis, dalam hal ini dapat dilihat secara statistik berdasarkan jumlah sitasi.



**Gambar 3.** Publikasi dokumen berdasarkan tahun

Sumber: Diolah penulis dari database Scopus (2025)

Gambar 3 menunjukkan data publikasi riset tentang pemerintahan desa di Indonesia berdasarkan tahun dari tahun 2003-2025 yang terindeks Scopus. Studi ini menemukan bahwa tahun 2023 merupakan tahun dengan jumlah publikasi artikel jurnal terbanyak dengan 20 dokumen, dimana lonjakan jumlah publikasi mulai terjadi dari tahun 2019, hingga akhirnya memuncak pada tahun 2023 dan kemudian menurun di tahun 2024 menjadi 18 dokumen. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa secara kompleks, dinamika pemilu di tahun 2019 memiliki dampak yang signifikan terhadap publikasi riset tentang pemerintahan desa di Indonesia. Kemudian, publikasi riset tentang pemerintahan desa di Indonesia pada awal tahun 2025 (hingga Juli), memiliki jumlah publikasi sebanyak 12 dokumen. Jumlah ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah dan melampaui jumlah publikasi di tahun 2024 dan 2023, mengingat masih banyak jurnal terindeks scopus yang memiliki jadwal penerbitan artikel dari agustus hingga desember 2025. Sementara terhitung dari tahun 2003 hingga 2018, jumlah publikasi terhitung paling banyak hanya 1 dokumen per tahun.

Tabel 1 menunjukkan daftar penulis teratas dalam jumlah publikasi, sebagaimana yang ditunjukkan dalam database Scopus. Pada batas-batas tertentu, upaya setiap penulis dapat dilihat dalam jumlah artikel yang telah diterbitkannya. Sebanyak 160 penulis berbeda ditemukan dalam penelusuran. Tabel 1 mengurutkan daftar penulis paling produktif tentang pemerintahan desa di Indonesia, dimana data menunjukkan bahwa Haryanto dari Universitas Hasanuddin, merupakan penulis yang paling banyak menerbitkan tentang topik ini, dengan jumlah publikasi sebanyak 3 dokumen. Sementara itu, Edward Aspinall, adalah penulis dengan jumlah kutipan terbanyak. Dapat dilihat bahwa selain Haryanto, penulis di urutan kedua hingga kesepuluh, memiliki jumlah publikasi sebanyak 2 dokumen untuk masing-masing penulis. Pengurutan dalam database scopus hanya membedakan produktifitas jumlah sitasi pada artikel jurnal yang berbicara tentang pemerintahan desa di Indonesia, bila publikasi artikel jurnal penulis berjumlah sama.

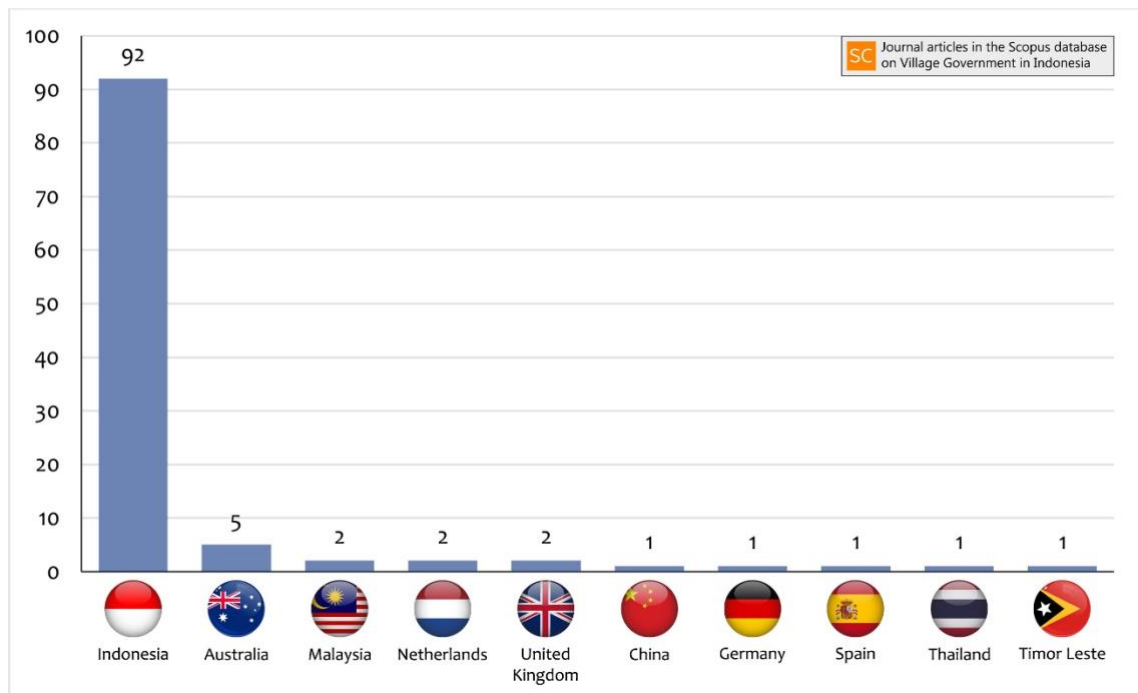
**Tabel 1.**  
**Jumlah dokumen berdasarkan penulis**

No.	Author Name	Documents	Affiliations	Cited
-----	-------------	-----------	--------------	-------

				Scopus	Google Scholar
1	Haryanto	3	Hasanuddin University	67	224
2	Hans Antlöv	2	The World Bank	298	2.651
3	Edward Aspinall	2	The Australian National University	1.623	12.843
4	Ward Berenschot	2	Universiteit van Amsterdam	626	2.898
5	Leonard Dharmawan	2	IPB University	253	365
6	Achmad Nizar Hidayanto	2	Universitas Indonesia	3.459	8.381
7	Desi Ilona	2	Universitas Ekasakti	61	445
8	MR Khairu Muluk	2	Brawijaya University	60	1.185
9	Neva Novianti	2	Universitas Bung Hatta	20	122
10	Heru Nurasa	2	Universitas Padjadjaran	98	725

Sumber: Diolah penulis dari database Scopus (2025)

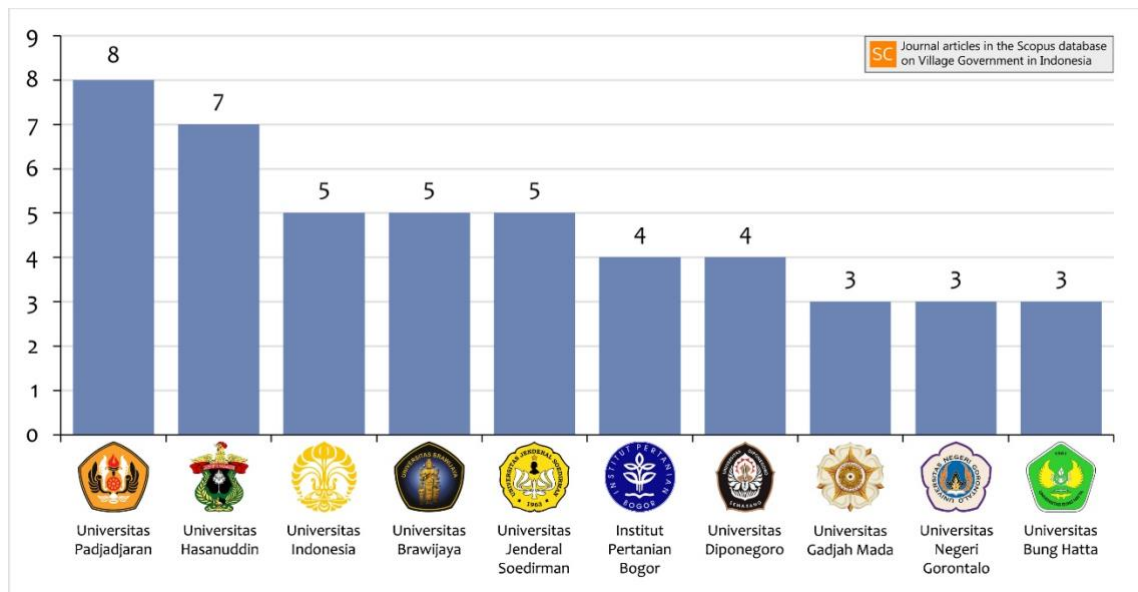
Selanjutnya adalah daftar negara-negara yang paling produktif dalam publikasi dokumen tentang pemerintahan desa di Indonesia (Gambar 4). Saat ini, terdapat 12 negara dan wilayah yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penelitian tentang pemerintahan desa di Indonesia. Diantara negara-negara tersebut, Gambar 4 menunjukkan 10 negara teratas untuk publikasi dokumen adalah Indonesia. Dengan topik penelitian yang lokusnya di negaranya sendiri, bukan hal yang mengherankan bila Indonesia menjadi negara paling produktif. Data juga menunjukkan bahwa Malaysia, Thailand dan Timor Leste sebagai negara sesama Asia Tenggara yang termasuk dalam daftar 10 negara teratas dalam publikasi dokumen. Adapun dua negara lain yang tidak dimasukkan dalam gambar 4 adalah negara Amerika Serikat dan Yaman, yang sama-sama memiliki jumlah publikasi sebanyak 1 dokumen.



**Gambar 4.** Jumlah dokumen berdasarkan negara/wilayah

Sumber: Diolah penulis dari database Scopus (2025)

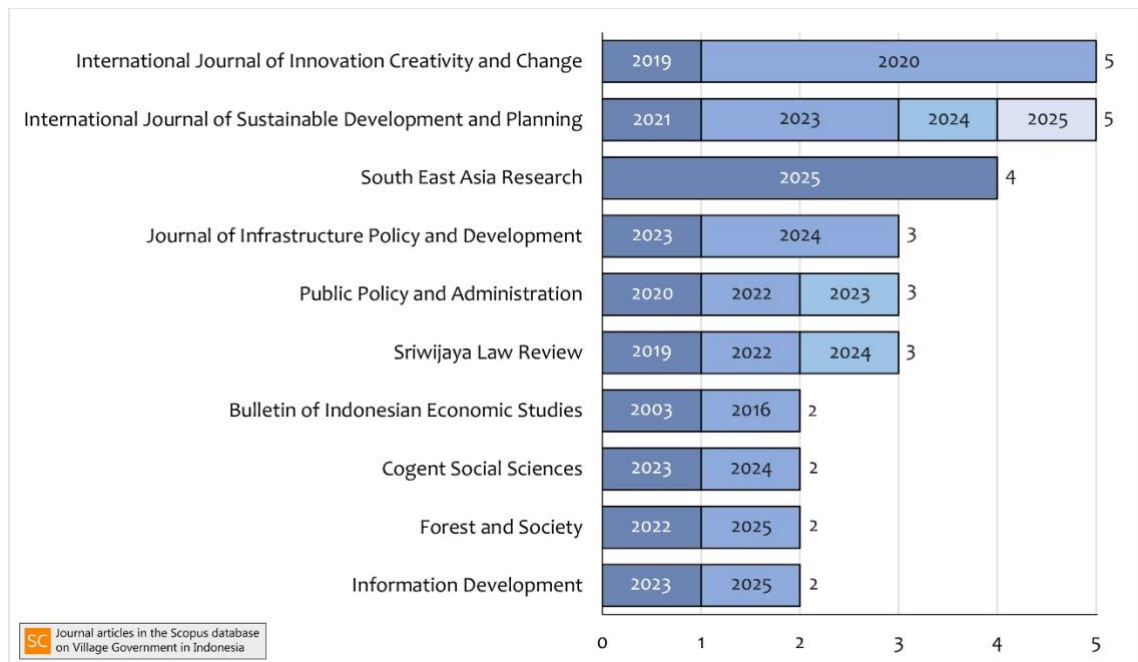
Gambar 5 memperlihatkan grafik afiliasi dalam produktivitas publikasi dokumen tentang pemerintahan desa di Indonesia dalam database Scopus. Gambar 4 menunjukkan bahwa 10 afiliasi teratas (dari 124 afiliasi secara keseluruhan) berasal dari Indonesia, dengan Universitas Padjajaran sebagai afiliasi paling produktif dengan jumlah 8 dokumen, diikuti Universitas Hasanuddin dengan 7 dokumen, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya dan Universitas Jenderal Soedirman dengan jumlah publikasi sebanyak 5 dokumen untuk masing-masing afiliasi. Sementara Institut Pertanian Bogor dan Universitas Diponegoro memiliki jumlah publikasi sama yaitu 4 dokumen. Hal yang sama juga terjadi pada Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Bung Hatta yang sama-sama memiliki jumlah publikasi sebanyak 3 dokumen. Temuan ini sekaligus mengonfirmasi data sebelumnya, dimana sepuluh afiliasi teratas adalah afiliasi yang berasal dari Indonesia, yakni negara yang paling produktif dalam jumlah publikasi tentang pemerintahan desa di Indonesia di database Scopus.



**Gambar 5.** Jumlah dokumen berdasarkan afiliasi

Sumber: Diolah penulis dari database Scopus (2025)

Beberapa sumber publikasi menerbitkan penelitian ilmiah terkait pemerintahan desa di Indonesia. Gambar 6 menunjukkan sepuluh sumber teratas (dari 68 sumber secara keseluruhan) yang menerbitkan penelitian tersebut. Sumber publikasi penelitian ilmiah terbanyak yang berbicara tentang pemerintahan desa di Indonesia dari tahun 2003 hingga 2025 adalah International Journal of Innovation Creativity and Change dan International Journal of Sustainable Development and Planning dengan lima dokumen untuk masing-masing sumber. Kemudian diikuti oleh South East Asia Research dengan empat dokumen. Selanjutnya, Journal of Infrastructure Policy and Development, Public Policy and Administration, Sriwijaya Law Review memiliki publikasi tiga dokumen untuk masing-masing sumber. Jumlah publikasi yang sama juga terjadi dengan Bulletin of Indonesian Economic Studies, Cogent Social Sciences, Forest and Society dan Information Development yang memiliki publikasi masing-masing sebanyak dua dokumen.



**Gambar 6.** Jumlah dokumen berdasarkan sumber  
 Sumber: Diolah penulis dari database Scopus (2025)

Yang menjadi perhatian dari Gambar 6 adalah sumber International Journal of Innovation Creativity and Change memiliki publikasi terbanyak tentang pemerintahan desa di Indonesia, telah discontinued dari Scopus di tahun 2020. Status yang sama juga terjadi pada Journal of Infrastructure Policy and Development yang discontinued dari Scopus di tahun 2024. Sementara itu, dua sumber dengan peringkat Q1 adalah Public Policy and Administration dan Bulletin of Indonesian Economic Studies. Selain itu lima sumber lainnya berada pada peringkat Q2 yakni South East Asia Research, Sriwijaya Law Review, Cogent Social Sciences, Forest and Society dan Information Development. Adapun satu sumber lainnya yang tersisa dalam daftar 10 sumber teratas adalah International Journal of Sustainable Development and Planning, yang memiliki peringkat Q3. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa kendati dua sumber teratas sudah discontinued dari Scopus, namun mayoritas sumber adalah sumber-sumber yang memiliki peringkat tinggi, serta memiliki sistem penyaringan artikel yang ketat.

Sementara itu, Tabel 2 menunjukkan daftar dokumen yang paling sering dikutip. Hans Antlöv menjadi penulis yang artikel jurnalnya paling banyak disitasi, yakni 96 sitasi untuk artikel jurnal berjudul "Village Governance, Community Life, and the 2014

Village Law in Indonesia", dan 94 sitasi untuk artikel berjudul "Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework". Dengan menggunakan studi longitudinal dari empat puluh desa di Indonesia pada tulisan pertamanya bersama beberapa rekan penulis, temuan penelitian Antlöv et al. (2016) menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berpotensi meningkatkan daya tanggap – melalui kombinasi sistem pengelolaan keuangan yang kuat, pengaturan kelembagaan nasional yang baru, dan pemberdayaan warga negara yang dapat memberikan tekanan pada pemerintah desa untuk bekerja demi kepentingan masyarakat – namun risiko dan hambatan substansial tetap ada. Sementara itu, pada artikel dengan sitasi terbanyak kedua, artikel Antlöv menyajikan kerangka hukum baru untuk demokratisasi politik tingkat lokal dan lembaga-lembaga desa. Antlöv (2003) berargumen bahwa keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat sipil harus memastikan bahwa peraturan tidak terdistorsi selama implementasi, dan bahwa masyarakat umum dilibatkan dalam pembuatan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Kemudian artikel dengan jumlah sitasi terbanyak ketiga adalah yang ditulis oleh Franz Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, yang berjudul "Changing one is changing all: Dynamics in the adat-islam-state triangle". Dengan mengeksplorasi proses sosial di mana hubungan segitiga antara adat, Islam dan aturan negara dipertahankan dan diubah sepanjang waktu di Sumatra Barat, Benda-Beckmann & Benda-Beckmann (2006) berargumen bahwa perubahan dalam satu ranah organisasi sosial, seperti pemerintahan desa dapat memengaruhi ranah lain, seperti pemanfaatan sumber daya atau pewarisan, sebagai bagian dari cara-cara khas sistem hukum.

**Tabel 2.**  
**Artikel jurnal paling banyak disitasi**

No.	Judul artikel	Authors	Source	Citations
1	Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia	Antlöv et al. (2016)	Bulletin of Indonesian Economic Studies	96
2	Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework	Antlöv (2003)	Bulletin of Indonesian Economic Studies	94

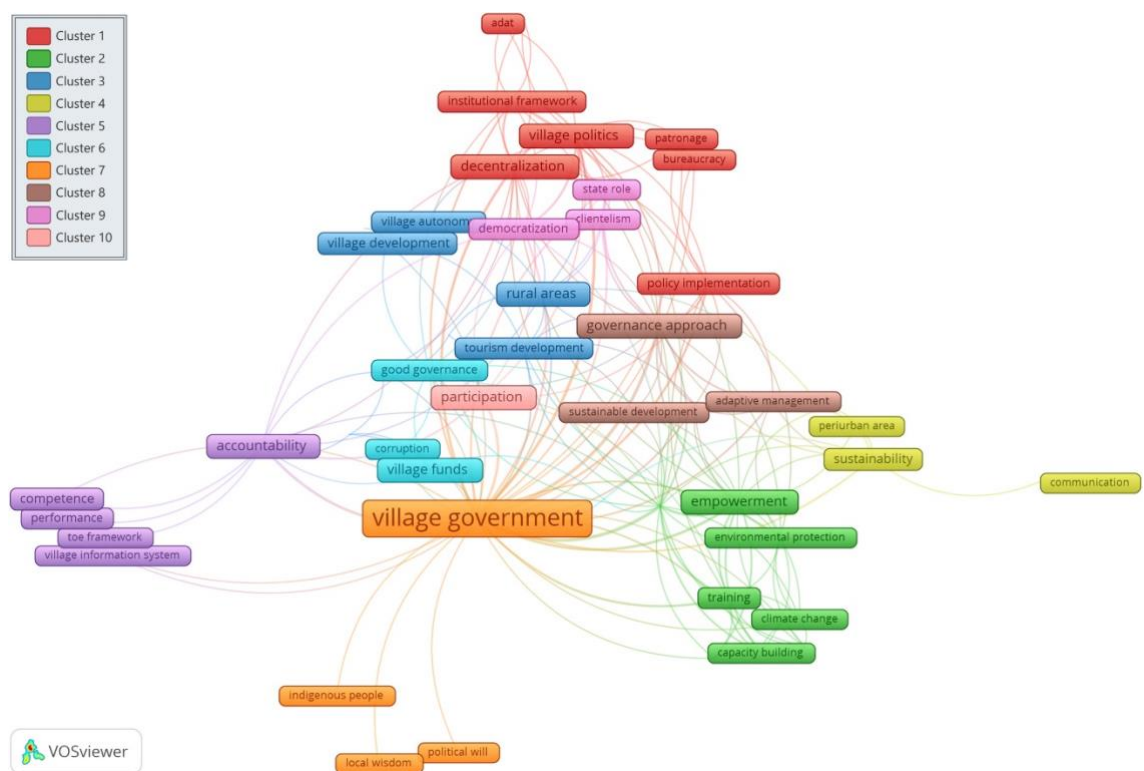
3	Changing one is changing all: Dynamics in the adat-islam-state triangle	Benda-Beckmann & Benda-Beckmann (2006)	Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law	38
4	Between adat and state: Institutional arrangements on Sumatra's forest frontier	McCarthy (2005)	Human Ecology	32
5	Development of Sustainable Community-Based Tourism in Kampong Grangsil, Jambangan Village, Dampit District, Malang Regency	Wikantiyoso et al. (2021)	International Review for Spatial Planning and Sustainable Development	24
6	The Role of Local Government on Rural Tourism Development: Case Study of Desa Wisata Pujonkidul, Indonesia	Firdaus et al. (2021)	International Journal of Sustainable Development and Planning	22
7	Identity in dispute: Law, religion, and identity in Minangkabau	Benda-beckmann & Benda-beckmann (2012)	Asian Ethnicity	17
8	Increasing the performance of village services with good governance and participation	Handayani et al. (2023)	World Development Sustainability	15
9	New development: IPSAS adoption, from G20 countries to village governments in developing countries	Fahmid et al. (2020)	Public Money and Management	15
10	Internal control systems and good village governance to achieve quality village financial reports	Sujana et al. (2020)	International Journal of Innovation, Creativity and Change	13

Sumber: Diolah penulis dari database Scopus (2025)

### Pemetaan Jaringan, Hampan dan Densitas: Topik Pemerintahan Desa

Untuk menganalisis perkembangan penelitian, penulis menganalisis kemunculan bersama kata kunci dan tren topik dari tema. Pemetaan dalam bentuk network visualization menunjukkan jumlah kemunculan kata kunci dalam dokumen dan hubungan antar kata kunci. Dalam network visualization, setiap istilah disajikan dengan node sedangkan ukuran node sepadan dengan jumlah publikasi di mana istilah itu ditemukan (Rasyid et al., 2025). Dalam studi ini, pemetaan co-occurrence kata kunci dibuat di VOSviewer, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7. Dengan menggunakan metode full counting yang diperuntukkan bagi semua kata kunci, penulis menetapkan jumlah minimum kemunculan kata kunci sebanyak 2 kali, di mana didapatkan 60 kata kunci yang memenuhi ambang batas dari total 472 kata kunci

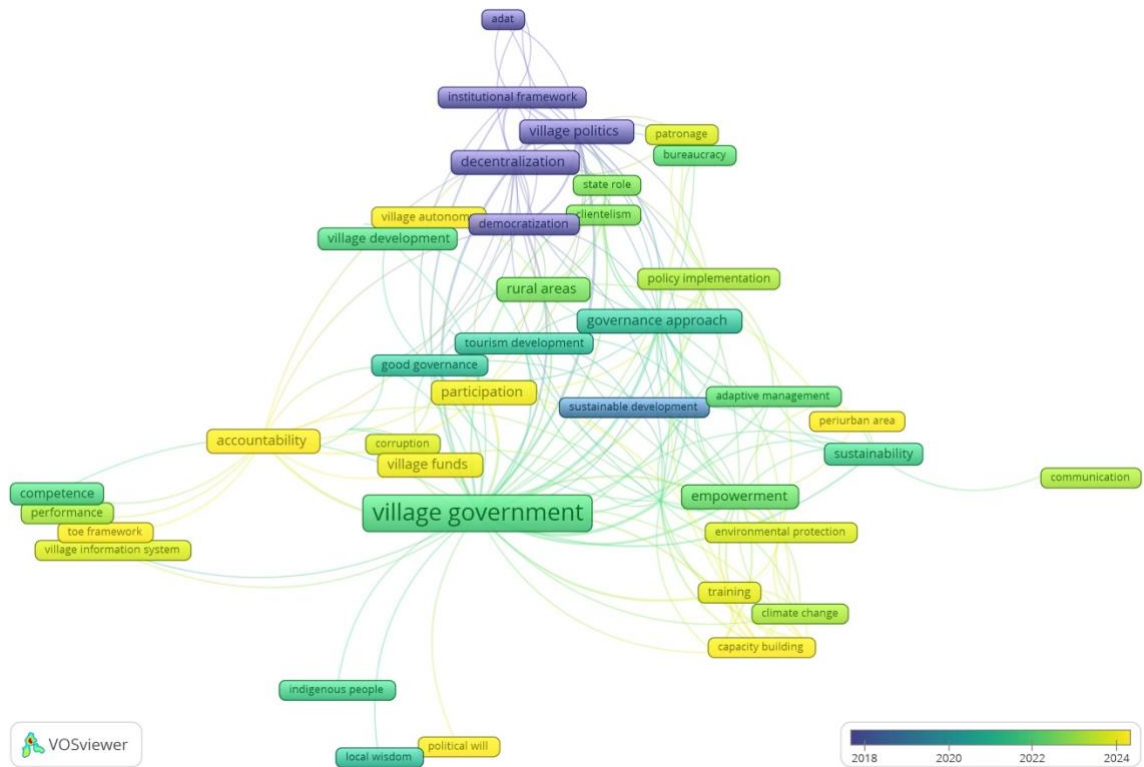
secara keseluruhan. Setelah melakukan penyaringan dengan memasukkan notepad thesaurus, penulis mendapati 55 kata kunci, dimana 52 kata kunci lainnya saling memiliki keterhubungan. Dalam bidang ilmiah, analisis kemunculan bersama kata kunci menciptakan jaringan topik dan hubungannya (Rasyid et al., 2024). Analisis kemunculan kata kunci yang paling sering (co-occurrence) dalam VOSviewer, memberikan wawasan tambahan tentang topik utama dan tren penelitian (Rasyid, 2022a). Lebih lanjut, semakin dekat dua kata kunci (node) yang terletak satu sama lain, semakin kuat keterkaitannya (Rasyid, 2022b).



**Gambar 7.** Visualisasi jaringan topik pemerintahan desa di Indonesia berdasarkan kata kunci  
Sumber: Diolah penulis dari VOSviewer (2025)

Gambar 7 menunjukkan bahwa peta bibliometrik kemunculan kata kunci mengungkapkan sepuluh kelompok (cluster) kata kunci bersama, dengan perwakilan warna yang berbeda-beda. Cluster 1 (berwarna merah) ditempati oleh kata kunci; village politics, decentralization, institutional framework, policy implementation, bureaucracy, patronage, adat dan customary law. Cluster 2 (berwarna hijau) terdiri dari kata kunci; local participation, empowerment, training, capacity building, environmental protection, climate change, strategy dan education. Sedangkan

cluster 3 (berwarna biru tua) ditempati oleh kata kunci; rural areas, tourism development, village governance, village development, innovation, partnership, village autonomy dan community participation. Cluster 4 (berwarna kuning); sustainability, collaboration, periurban area, society, stunting dan communication. Cluster 5 (berwarna ungu); accountability, performance, competence, good village governance, toe framework dan village information system. Cluster 6 (berwarna biru muda); good governance, village funds, management dan corruption. Cluster 7 (berwarna orange); village government, indigenous people, local wisdom dan political will. Cluster 8 (berwarna coklat); governance approach, rural planning, adaptive management dan sustainable development. Cluster 9 (merah muda): democratization, clientelism dan state role, serta kata kunci participation yang berada di cluster 10. Tiap-tiap kata kunci dari keseluruhan cluster, memiliki jumlah kemunculan (occurrences) dan keterhubungan (link strength) yang berbeda-beda, bergantung pada ukuran nodenya. Tabel 3 menunjukkan detail items, occurrences serta total links strength oleh tiap-tiap item dalam sepuluh cluster berbeda, yang dihasilkan dari analisis VOSviewer. Selanjutnya, untuk melihat intensitas waktu dalam publikasi mengenai pemerintahan desa di Indonesia, Gambar 8 menunjukkan pemetaan kata kunci berdasarkan tahun pembahasannya.



**Gambar 8.** Visualisasi overlay topik pemerintahan desa di Indonesia berdasarkan kata kunci  
 Sumber: Diolah penulis dari VOSviewer (2025)

Gambar 8 menunjukkan perubahan topikal dalam literatur mengenai pemerintahan desa di Indonesia sejak tahun 2018 hingga 2025. Dalam overlay visualization, semakin kuning warna dari suatu node, menggambarkan tren terbaru penelitian yang dilakukan (Rasyid et al., 2025). Warna kuning pada node seperti; strategy, education village autonomy hingga patronage adalah daftar kata kunci yang cenderung baru dalam hubungannya dengan publikasi mengenai pemerintahan desa di Indonesia. Sesuai spektrum warna yang tersedia di dalam gambar, daftar kata kunci yang telah disebutkan tersebut, merupakan kata kunci yang rata-rata dipublikasi pada tahun 2024-2025. Sementara kata kunci berwarna gelap seperti; institutional framework, adat hingga customary law merupakan daftar kata kunci yang rata-ratanya dipublikasi di bawah tahun 2018. Tabel 3 menunjukkan daftar tahun publikasi rata-rata dari tiap-tiap items dalam sepuluh cluster berbeda, berdasarkan tahun pembahasannya.

**Table 3.**

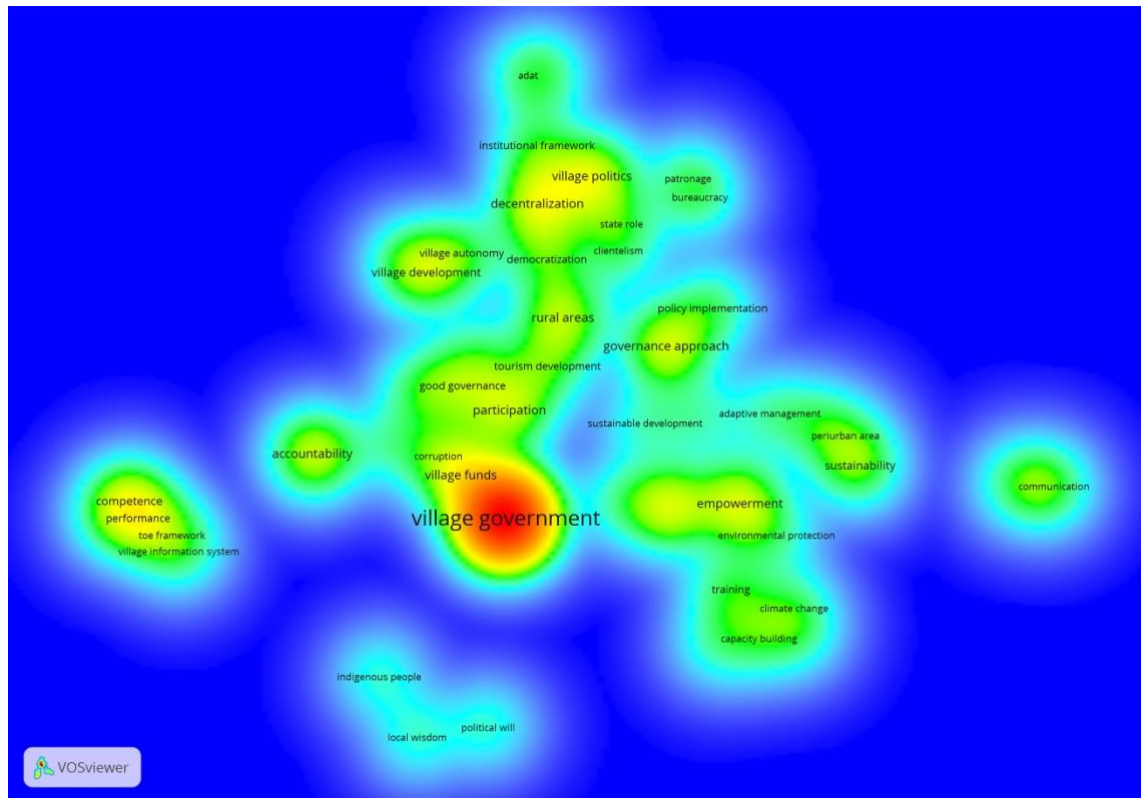
Kata kunci, occurrences, cluster dan mean publikasi berdasarkan tahun tentang pemerintahan desa di Indonesia

Cluster	id	Kata kunci	occurrences	Total link strength	Avg. pub. year
Cluster 1	452	village politics	6	28	2017.17
	90	decentralization	6	24	2016.50
	199	institutional framework	3	14	2008.00
	294	policy implementation	3	13	2023.00
	31	bureaucracy	2	5	2022.00
	285	patronage	2	5	2023.50
	8	adat	2	4	2008.50
	86	customary law	2	4	2013.00
Cluster 2	240	local participation	6	32	2021.83
	125	empowerment	6	28	2022.17
	422	training	3	15	2023.67
	37	capacity building	2	12	2024.50
	132	environmental protection	2	12	2023.50
	48	climate change	2	7	2023.00
	384	strategy	2	7	2025.00
	121	education	2	6	2024.00
Cluster 3	334	rural areas	5	12	2022.40
	415	tourism development	3	10	2021.00
	441	village governance	3	6	2021.67
	434	village development	4	5	2021.75
	194	innovation	2	4	2021.50
	282	partnership	2	3	2020.50
	431	village autonomy	3	3	2024.00
	64	community participation	2	1	2021.50
Cluster 4	397	sustainability	4	10	2021.50
	50	collaboration	2	4	2023.50
	292	periurban area	2	3	2024.00
	367	society	2	2	2022.50
	386	stunting	2	2	2023.50
	55	communication	2	1	2023.00
Cluster 5	3	accountability	6	17	2024.00
	290	performance	3	5	2023.00
	70	competence	4	5	2021.75
	163	good village governance	2	3	2020.00
	412	toe framework	2	3	2024.50
	446	village information system	2	2	2023.50
Cluster 6	162	good governance	3	10	2021.00
	439	village funds	5	7	2023.80
	246	management	2	4	2022.00
	76	corruption	2	3	2023.50
Cluster 7	443	village government	33	83	2021.76

	184	indigenous people	2	1	2021.50
	243	local wisdom	2	1	2021.00
	303	political will	2	1	2024.00
Cluster 8	165	governance approach	6	30	2021.00
	339	rural planning	2	11	2021.50
	7	adaptive management	2	8	2022.00
	400	sustainable development	2	6	2019.00
Cluster 9	96	democratization	3	15	2016.00
	47	clientelism	2	10	2022.50
	381	state role	2	10	2022.50
Cluster 10	279	participation	5	13	2023.80

Sumber: Diolah penulis dari VOSviewer (2025)

Sementara itu, visualisasi densitas mengartikan bahwa setiap node dengan warna yang bergantung pada kepadatan item, dimana warna node pada peta bibliometrik, bergantung pada jumlah node yang berada disekitarnya (Rasyid, 2022a). Dengan kata lain, semakin terang warna suatu node dalam visualisasi densitas, mencerminkan kepadatan kajian yang bersinggungan dengan topik utama, sedangkan yang berjarak jauh serta cenderung meredup menandakan topik tersebut belum banyak diteliti (Rasyid et al., 2024). Gambar 9 menunjukkan visualisasi densitas dari penelitian mengenai pemerintahan desa di Indonesia.

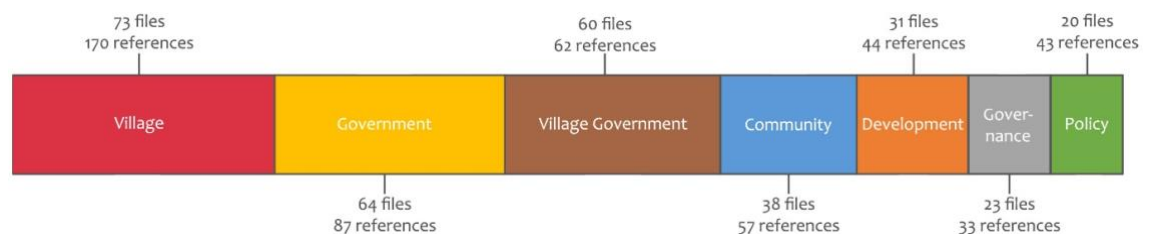


**Gambar 9.** Visualisasi densitas topik pemerintahan desa  
*Sumber: Diolah penulis dari VOSviewer (2025)*

Gambar 9 menunjukkan tingkat kepadatan yang ditunjukkan oleh banyaknya kata kunci yang sering muncul (berwarna kuning kemerahan) seperti kata; village funds, decentralization, village politics hingga performance dan competence, yang merupakan kata kunci yang telah banyak diteliti dalam hubungan dengan topik penelitian. Sementara kata-kata lain yang cenderung redup dalam visualisasi densitas, seperti kata; patronage, communication, patronage, hingga bureaucracy, merupakan topik-topik yang masih jarang diteliti dalam hubungannya dengan topik pemerintahan desa di Indonesia, pada database Scopus. Sehingga, kesempatan untuk meneliti daftar kata/topik yang disebutkan terakhir, masih terbuka lebar, terutama yang dipublikasi dalam database Scopus. Topik-topik redup dalam pemetaan density visualization, merupakan daftar kata yang rata-ratanya memiliki nilai occurrences rendah, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

### Kategorisasi, Korelasi, dan Pemetaan Topik Dominan

Berdasarkan pengidentifikasian tema melalui pengkodean otomatis menggunakan fitur autocode dalam software NVivo 12 plus terhadap 96 dokumen terindeks Scopus, didapati tujuh tema utama yang membahas tentang pemerintahan desa di Indonesia (Gambar 10), yakni; village, government, village government, community, development, governance dan policy. NVivo sendiri, memungkinkan peneliti untuk mengelola dan menyusun data serta mempermudah menganalisis data, mengidentifikasi tema, mengumpulkan wawasan, dan mengembangkan kesimpulan. Secara kritis, NVivo memungkinkan peneliti untuk mengkodekan semua data dan membuat tema, kategori, atau simpul (Sotiriadou et al., 2014).



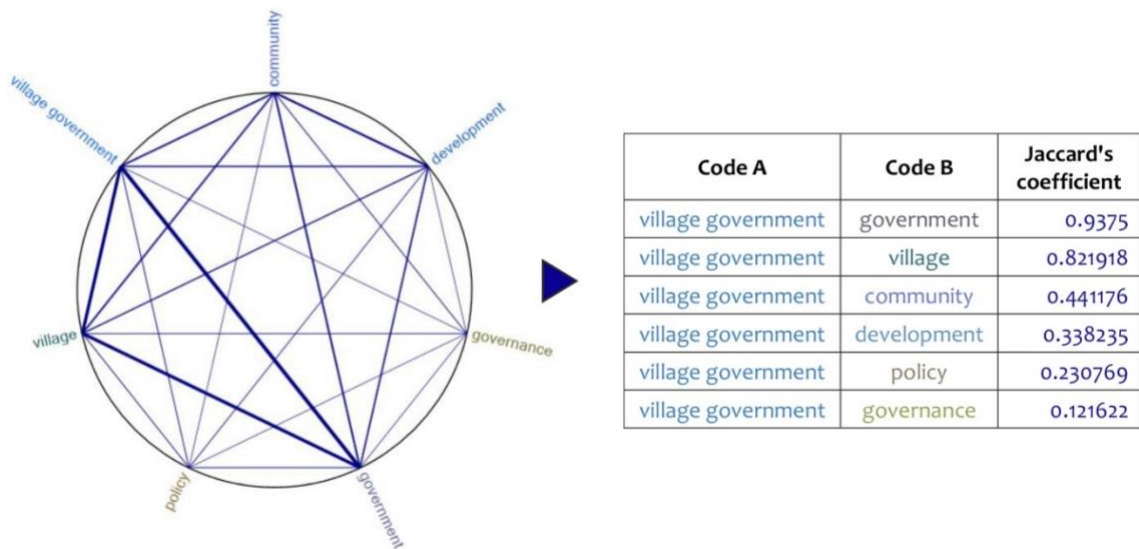
**Gambar 10.** Kategorisasi tema

Sumber: Diolah penulis dari NVivo 12 plus (2025)

Berdasarkan Gambar 10, dapat dilihat bahwa setiap tema memiliki komposisi file dan sumber rujukan yang berbeda-beda, di mana tema village, government dan village government, memiliki komposisi file dan sumber acuan yang lebih banyak yakni 73 files dan 170 sumber rujukan (village), 64 files dan 87 sumber rujukan (government) serta village government dengan 60 files dan 62 sumber rujukan. Sumber rujukan yang dimaksud, adalah banyaknya jumlah paragraf yang berisikan tentang setiap tema bersangkutan, di dalam setiap file. Hal ini didasarkan dalam fitur autocode pada software NVivo 12 plus, dimana penulis memilih opsi paragraf sebagai pengklasifikasian tema, agar pembacaan yang dilakukan oleh NVivo 12 plus lebih luas dibanding penjelajahan berdasarkan kalimat.

Untuk menganalisis hubungan antar tema, koefisien Jaccard dihitung di seluruh tema. Himpunan koefisien Jaccard digunakan oleh NVivo 12 plus untuk melakukan dendogram yang menggambarkan hubungan (kesamaan dan perbedaan) di seluruh tema (Gómez-Corona et al., 2017; Cuellar-Rojas et al., 2021). Hasil review terhadap 96

dokumen menggunakan fitur cluster analysis dalam NVivo 12 plus, menunjukkan bahwa terdapat hubungan kuat antara tema village government dan government, yang dalam visualisasinya ditandai dengan garis penghubung yang lebih tebal (Gambar 11). Korelasi antar tema ini sekaligus mengonfirmasi bahwa publikasi-publikasi yang telah dilakukan pada rentang tahun 2000-2025 tentang pemerintahan desa di Indonesia, didominasi oleh ketujuh tema ini.



**Gambar 11.** Korelasi Antar Topik  
*Sumber: Diolah penulis dari NVivo 12 plus (2025)*

Lebih lanjut, dengan menggunakan fitur Word Frequency Query dalam software NVivo 12 plus, dengan tujuan untuk mengeksplorasi kata-kata yang paling sering muncul dalam dokumen publikasi, penulis membatasi jumlah kata sebanyak 50 kata yang paling sering muncul dalam publikasi dokumen tentang pemerintahan desa di Indonesia. Dengan fitur analisis ini, kata-kata yang memiliki arti yang sama dapat dikategorikan dalam kelompok yang sama. Kata-kata yang tidak memiliki makna atau tidak berhubungan dengan topik/kata kunci penelitian, dimasukkan ke dalam daftar kata yang dihilangkan, untuk mendapatkan hasil yang lebih kuat dan ketat dalam daftar kata yang dipaparkan. Daftar kata yang dihasilkan, sekaligus mewakili narasi dari publikasi dokumen tentang pemerintahan desa di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data terhadap 96 dokumen, kata-kata dominan yang didapatkan adalah: village, government, community, development, local, data, social, policy, economic,

governance, tourism hingga land. Daftar kata-kata tersebut ditafsirkan bahwa keseluruhan fokus penelitian tentang demokrasi di Indonesia, bermuara pada daftar kata yang ditunjukkan. Tabel 4 memuat daftar 50 kata dominan dari 96 publikasi dokumen tentang pemerintahan desa di Indonesia.



**Gambar 12.** Topik dominan  
 Sumber: Diolah penulis dari NVivo 12 plus (2025)

**Tabel 4.**  
 Daftar topik dominan

Word	Count	Word	Count	Word	Count
village	371	participation	40	sdgs	24
government	145	accountability	38	stakeholders	23
community	130	knowledge	37	food	22
development	94	factors	35	participatory	22
indonesia	94	implementation	34	performance	22
local	71	legal	30	actors	21
data	70	policies	30	commitment	21
social	66	planning	28	empowerment	21
policy	65	officials	26	programs	21
economic	61	area	25	sustainable	21
governance	61	district	25	voe	21
tourism	59	public	25	workers	21
land	56	regency	25	collaboration	20
villages	54	resources	25	culture	20
management	52	law	24	focus	20
rural	50	level	24	governments	20
program	45	role	24		

Sumber: Diolah penulis dari NVivo 12 plus (2025)

Gambar 12 memperlihatkan bahwa kata-kata yang berukuran besar, seperti; *village*, *government*, *community*, *development*, *local*, *data*, *social*, *policy*, *economic* hingga *governance*, merupakan kata-kata yang paling sering disinggung. Lebih lanjut, detail dalam Tabel 4 juga memperlihatkan daftar kata seperti; *sdgs*, *sustainable*, *food*, *empowerment*, hingga *development*, yang menandakan adanya studi tentang pembangunan berkelanjutan. Salah satu penelitian yang membahas tentang ini adalah penelitian (Tisnanta et al., 2024), yang menjelaskan bahwa tantangan yang terus-menerus dalam alokasi sumber daya dan koordinasi pemangku kepentingan tetap ada meskipun ada kemajuan dalam mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam kerangka hukum nasional. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data sekunder, penelitian ini mengungkapkan kemajuan yang signifikan sekaligus mengidentifikasi kesenjangan kritis yang perlu diatasi untuk memastikan implementasi TPB Desa yang efektif.

### Implikasi Teoretis terhadap Studi Tata Kelola dan Demokrasi Lokal

Temuan bibliometrik dalam penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan bagi pengembangan studi tata kelola (*governance*) dan demokrasi lokal, khususnya dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Secara konseptual, tren publikasi yang teridentifikasi menunjukkan pergeseran fokus kajian dari pendekatan normatif-institusional menuju pendekatan yang lebih kompleks dan multidimensional, yang memadukan aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya dalam memahami dinamika demokrasi di tingkat lokal.

Pertama, dominasi kata kunci seperti *village government*, *decentralization*, *village funds*, *participation*, dan *accountability* mengonfirmasi bahwa studi pemerintahan desa di Indonesia secara teoretis berakar kuat pada paradigma desentralisasi dan demokrasi partisipatoris. Hal ini memperkuat argumen bahwa desa tidak lagi diposisikan sekadar sebagai unit administratif, melainkan sebagai arena politik lokal tempat berlangsungnya relasi kekuasaan, distribusi sumber daya, dan praktik demokrasi sehari-hari. Tren publikasi ini berkontribusi pada pengembangan teori demokrasi lokal yang menempatkan desa sebagai lokus penting dalam konsolidasi demokrasi pasca-reformasi.

Kedua, pemetaan *co-occurrence* kata kunci yang menghasilkan sepuluh cluster tematik menunjukkan bahwa studi tata kelola desa berkembang secara lintas perspektif teoretis. Cluster yang memuat tema seperti *village politics*, *patronage*, *clientelism*, dan *state role* memperkaya diskursus demokrasi lokal dengan memasukkan dimensi politik informal dan relasi kuasa non-prosedural. Temuan ini memperluas pemahaman teoritis bahwa praktik demokrasi lokal di tingkat desa tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan institusional formal, tetapi juga harus dianalisis melalui lensa politik patronase, relasi elite-masyarakat, serta interaksi antara negara dan aktor lokal.

Ketiga, kemunculan tema-tema baru dalam *overlay visualization* periode 2018-2025 seperti *strategy*, *education*, *village autonomy*, dan *political will*, menunjukkan pergeseran teoretis dari sekadar evaluasi kebijakan menuju analisis kapasitas dan agensi aktor lokal. Secara teoretis, hal ini menegaskan kontribusi literatur pemerintahan desa terhadap pengembangan pendekatan tata kelola yang berpusat pada aktor dalam studi demokrasi lokal, di mana kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh kapasitas, kompetensi, dan kehendak politik aktor-aktor desa.

Keempat, analisis densitas topik mengindikasikan bahwa isu-isu seperti *village funds*, *performance*, dan *good governance* telah menjadi arus utama dalam kajian tata kelola desa, sementara topik seperti *bureaucracy*, *communication*, dan *patronage* masih relatif kurang dieksplorasi. Secara teoretis, kondisi ini membuka ruang bagi pengayaan teori demokrasi lokal melalui eksplorasi aspek-aspek mikro tata kelola, khususnya praktik birokrasi desa, komunikasi politik lokal, dan mekanisme informal yang memengaruhi akuntabilitas dan partisipasi warga.

Kelima, hasil kategorisasi tema menggunakan NVivo 12 Plus yang mengidentifikasi tujuh tema utama (*village*, *government*, *village government*, *community*, *development*, *governance*, dan *policy*) menunjukkan bahwa literatur pemerintahan desa di Indonesia bersifat integratif antara studi pembangunan dan studi demokrasi. Implikasi teoretisnya adalah semakin kaburnya batas antara diskursus pembangunan lokal dan demokrasi lokal, di mana tata kelola desa dipahami

sebagai ruang negosiasi antara tujuan pembangunan, partisipasi warga, dan praktik demokrasi substantif.

Secara keseluruhan, tren publikasi penelitian tentang pemerintahan desa di Indonesia tidak hanya merefleksikan perkembangan empiris kebijakan desa pasca-Undang-Undang Desa 2014, tetapi juga berkontribusi secara teoretis dalam memperkaya studi tata kelola dan demokrasi lokal. Literatur ini mendorong pengembangan kerangka teoretis yang lebih kontekstual, yang menggabungkan dimensi institusional, aktor, budaya lokal, dan relasi kuasa, sekaligus menegaskan posisi desa sebagai fondasi penting dalam analisis demokrasi di negara berkembang.

## KESIMPULAN

Penelitian ini tidak hanya memetakan perkembangan publikasi global mengenai pemerintahan desa di Indonesia selama periode 2000-2025, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan studi demokrasi dan tata kelola lokal. Temuan bibliometrik menunjukkan bahwa peningkatan signifikan publikasi pasca-2019, dengan puncak pada tahun 2023, merefleksikan semakin menguatnya perhatian akademik global terhadap desa sebagai arena strategis demokratisasi, partisipasi warga, dan implementasi kebijakan desentralisasi, khususnya pasca-berlakunya Undang-Undang Desa Tahun 2014.

Dominasi kata kunci *village government* dan *local participation* dalam analisis VOSviewer menegaskan bahwa diskursus pemerintahan desa di Indonesia secara konseptual masih berpusat pada relasi antara institusi desa dan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa desa tidak lagi dipahami semata sebagai unit administratif, melainkan sebagai ruang sosial-politik yang dinamis, tempat praktik tata kelola, pemberdayaan, dan demokrasi lokal berlangsung. Studi ini berkontribusi dalam memperkuat posisi pemerintahan desa sebagai subbidang penting dalam kajian tata kelola (*governance*) dan studi demokrasi lokal di negara berkembang.

Lebih lanjut, hasil kategorisasi tema melalui NVivo 12 Plus memperlihatkan bahwa meskipun topik *village* menjadi tema dominan, keterkaitan antartema menunjukkan adanya fragmentasi fokus kajian. Kondisi ini mengindikasikan kebutuhan akan pendekatan teoretis yang lebih integratif, yang menghubungkan

aspek kelembagaan, budaya lokal, komunikasi pemerintahan, dan kehendak politik dalam satu kerangka analisis pemerintahan desa yang lebih komprehensif. Dengan kata lain, kontribusi utama penelitian ini terletak pada kemampuannya mengidentifikasi pola dominasi sekaligus keterbatasan konseptual dalam literatur yang ada.

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi pembangunan desa untuk memahami arah dan kecenderungan kajian pemerintahan desa di tingkat global. Pemetaan ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan agenda riset dan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan aktual desa di Indonesia, terutama dalam memperkuat partisipasi masyarakat, tata kelola yang inklusif, serta pengakuan terhadap kearifan lokal.

Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan database Scopus, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan publikasi global. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengintegrasikan database lain seperti Web of Science guna memperkaya cakupan analisis dan memperdalam refleksi teoretis tentang pemerintahan desa di Indonesia dalam konteks global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrutha, V. N., & Geetha, S. N. (2020). A systematic review on green human resource management: Implications for social sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 247, 119131. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119131>
- Antlöv, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214. <https://doi.org/10.1080/00074910302013>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Benda-beckmann, F. Von, & Benda-beckmann, K. Von. (2012). Identity in dispute : law , religion , and identity in Minangkabau. *Asian Ethnicity*, 13(4), 341–358. <https://doi.org/10.1080/14631369.2012.710073>
- Benda-Beckmannn, F., & Benda-Beckmannn, K. von. (2006). Changing one is changing all: Dynamics in the adat-islam-state triangle. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 38(53–54), 239–270.

<https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756604>

- Churiyaha, M., Sholikhan, S., & Filianti, F. (2022). Mobile learning uses in vocational high school: A bibliometric analysis. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, 14(2), 484–497. <https://doi.org/10.18844/wjet.v14i2.6990>
- Cuellar-Rojas, O.-A., Hincapié, M., Contero, M., & Güemes-castorena, D. (2021). Intelligent Tutoring System: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. *Research Square*, 1–33.
- Fahimnia, B., Sarkis, J., & Davarzani, H. (2015). Green supply chain management: A review and bibliometric analysis. In *International Journal of Production Economics* (Vol. 162). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.01.003>
- Fahmid, I. M., Harun, H., Graham, P., Carter, D., An, Y., Zheng, X., & Fahmid, M. M. (2019). New development: IPSAS adoption, from G20 countries to village governments in developing countries. *Public Money & Management*. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1617540>
- Firdaus, Hardjosoekarto, S., & Lawang, R. M. Z. (2021). The Role of Local Government on Rural Tourism Development: Case Study of Desa Wisata Pujonkidul, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 16(7), 1299–1307. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.160710>
- Gómez-Corona, C., Escalona-Buendía, H. B., Chollet, S., & Valentin, D. (2017). The building blocks of drinking experience across men and women: A case study with craft and industrial beers. *Appetite*, 116, 345–356. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.05.026>
- González-Torres, T., Rodríguez-Sánchez, J. L., Pelechano-Barahona, E., & García-Muiña, F. E. (2020). A systematic review of research on sustainability in mergers and acquisitions. *Sustainability (Switzerland)*, 12(2), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su12020513>
- Hallinger, P., & Suriyankietkaew, S. (2018). Science Mapping of the Knowledge Base on Sustainable Leadership, 1990-2018. *Sustainability (Switzerland)*, 10(12), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su10124846>
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). World Development Sustainability Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3(June), 100089. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Herrera-Franco, G., Montalván-Burbano, N., Carrión-Mero, P., Apolo-Masache, B., & Jaya-Montalvo, M. (2020). Research trends in geotourism: A bibliometric analysis using the scopus database. *Geosciences (Switzerland)*, 10(10), 1–29. <https://doi.org/10.3390/geosciences10100379>
- Hockerts, K., Muñoz, P., Janssen, F., & Nicolopoulou, K. (2018). Advancing sustainable entrepreneurship through substantive research. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 24(2), 322–332. <https://doi.org/10.1108/IJEER-03-2018-427>

- Jhamb, D., Kampani, N., & Arya, V. (2021). Embracing the employee orientation: does customer relationship matter in brand building? *Benchmarking*. <https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2020-0614>
- Keathley-Herring, H., Van Aken, E., Gonzalez-Aleu, F., Deschamps, F., Letens, G., & Orlandini, P. C. (2016). Assessing the maturity of a research area: bibliometric review and proposed framework. *Scientometrics*, 109(2), 927–951. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2096-x>
- Knapczyk, A., Francik, S., Pedryc, N., & Hebda, T. (2018). Bibliometric analysis of research trends in engineering for rural development. *Jelgava*, 700–707. <https://doi.org/10.22616/ERDev2018.17.N389>
- Kridasakti, S. W., Fadli, M., Madjid, A., & Nurcholli, C. (2022). Chronic Disease of State Corporatism in Indonesian Village Government. *Sriwijaya Law Review*, 6(2), 304–318. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.403.pp304-318>
- Liao, H., Tang, M., Luo, L., Li, C., Chiclana, F., & Zeng, X. J. (2018). A bibliometric analysis and visualization of medical big data research. *Sustainability (Switzerland)*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su10010166>
- Machmud, M., Irawan, B., Karinda, K., Susilo, J., & Salahudin. (2021). Analysis of the intensity of communication and coordination of government officials on twitter social media during the Covid-19 handling in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(3), 319–334. <https://doi.org/10.36941/AJIS-2021-0087>
- Mahsun, M., Kasyfilham, F., & Triantini, Z. E. (2025). Village–state relations in post-New Order Indonesia: political lobbying, village grants and clientelism. *South East Asia Research*, 33(1), 32–48. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483161>
- McCarthy, J. F. (2005). Between Adat and State: Institutional Arrangements on Sumatra’s Forest Frontier. *Human Ecology*, 33(1), 57–82. <https://doi.org/10.1007/s10745-005-2426-8>
- Montalván-Burbano, N., Pérez-Valls, M., & Plaza-Úbeda, J. (2020). Analysis of scientific production on organizational innovation. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1745043>
- Muhtar, E. A., Abdillah, A., Widianingsih, I., & Adikancana, Q. M. (2023). Smart villages, rural development and community vulnerability in Indonesia: A bibliometric analysis. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2219118>
- Niñerola, A., Sánchez-Rebull, M. V., & Hernández-Lara, A. B. (2019). Tourism research on sustainability: A bibliometric analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 11(5), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su11051377>
- Nobanee, H., Hamadi, F. Y. Al, Abdulaziz, F. A., Abukarsh, L. S., Alqahtani, A. F., Alsubaey, S. K., Alqahtani, S. M., & Almansoori, H. A. (2021). A bibliometric analysis of sustainability and risk management. *Sustainability (Switzerland)*, 13(6), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su13063277>
- Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2023). Thirty Years of Village

- Corruption Research: Accounting and Smart Villages for Village Sustainability as Future Research Direction. *Sustainability (Switzerland)*, 15(12). <https://doi.org/10.3390/su15129264>
- Rahoveanu, M. M. T., Serban, V., Zugravu, A. G., Rahoveanu, A. T., Cristea, D. S., Nechita, P., & Simionescu, C. S. (2022). Perspectives on Smart Villages from a Bibliometric Approach. *Sustainability (Switzerland)*, 14(17). <https://doi.org/10.3390/su141710723>
- Rasyid, S. B. A. (2022a). Gender Equality in the Global Research Publication: The Bibliometric Review and Scientific Visualization. *Humanus*, 21(1), 41. <https://doi.org/10.24036/humanus.v21i1.115645>
- Rasyid, S. B. A. (2022b). Peta Perkembangan Penelitian Mengenai Pemerintah Amerika Serikat Dan China. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 10(2), 153–169. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v10i2.4522>
- Rasyid, S. B. A., Misran, & Subekti, D. (2025). Global Research Publication on Democracy in Indonesia: A Bibliometric Review and Scientific Visualization. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 13(1), 87–109. <https://doi.org/10.21831/natapraja.v13i1.84454>
- Rasyid, S. B. A., Nurmandi, A., Salahudin, & Rahmawati, D. E. (2024). A Meta-Analysis on Democracies in Indonesia. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 9(1), 58–77. <https://doi.org/10.24905/jip.9.1.2024.58-77>
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). Pemerintahan Desa. In *Zanafa Publishing*. Zanafa Publishing. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056> <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827> <https://doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005> <http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
- Rojas-Figueroa, A. M., Londoño-Gallego, J. A., Pérez-Betancur, N., & Gómez-Navarro, M. V. (2019). Analysis of the big data generated in the company's social networks "sistemas Expertos SAS" using NVivo. *Journal of Physics: Conference Series*, 1418(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1418/1/012004>
- Sotiriadou, P., Brouwers, J., & Le, T. A. (2014). Choosing a qualitative data analysis tool: A comparison of NVivo and Leximancer. *Annals of Leisure Research*, 17(2), 218–234. <https://doi.org/10.1080/11745398.2014.902292>
- Sujana, E., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. H. (2020). Internal control systems and good village governance to achieve quality village financial reports. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9), 98–108.
- Sulistyaningsih, T., Nurmandi, A., Kamil, M., Roziqin, A., Salahudin, Jainuri, Sihidi, I. T., Apriyanto Romadhan, A., & Loilatu, M. J. (2021). Formulating Sustainable Watershed Governance Model: A Meta-analysis of Watershed Governance. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(2), 90–104. <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0041>

- Tang, M., Liao, H., Wan, Z., Herrera-Viedma, E., & Rosen, M. A. (2018). Ten years of Sustainability (2009 to 2018): A bibliometric overview. *Sustainability (Switzerland)*, 10(5), 1–21. <https://doi.org/10.3390/su10051655>
- Tisnanta, H. S., Sabatira, F., Putri, R. W., Pereira, L., & Banjarani, D. R. (2024). Navigating Legal Complexities in Localising the Sustainable Development Goals Agenda for Village Governance in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 8(2), 335–357. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2.2997.pp335-357>
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2017). Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. *Scientometrics*, 111(2), 1053–1070. <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2300-7>
- Wayan, N., Dewi, P., Oka, A. A. N., & Gorda, S. (2021). The Bali Health Office Strategies Formulating : Reflection on The New Public Management. *Enrichment: Journal of Management*, 11(2), 433–446.
- Wikantiyoso, R., Cahyaningsih, D. S., Sulaksono, A. G., Widayati, S., Poerwoningsih, D., & Triyosoputri, E. (2021). Development of Sustainable Community-Based Tourism in Kampong Grangsil, Jambangan Village, Dampit District, Malang Regency. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 9(1), 64–77. [https://doi.org/10.14246/IRSPSD.9.1\\_64](https://doi.org/10.14246/IRSPSD.9.1_64)